

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA  
DALAM INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI DI DESA RAYA**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**JULIANA BR GINTING**  
**2103100034**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2025**

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : JULIANA BR GINTING  
NPM : 2103100034  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA  
DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
DI TERINTEGRASI DI DESA RAYA

Medan, 21 Maret 2025

Pembimbing



Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos, M.A  
NIDN: 0104098703

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP  
NIDN: 0122118801

Dekan

Assoc. Prof., Dr., ABIFIN SALEH., S.Sos., MSP  
NIDN: 0030017402

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : JULIANA BR GINTING  
NPM : 2103100034  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP (.....)  
PENGUJI II : Agung Sahputra, S.Sos., M.AP (.....)  
PENGUJI III : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., MA (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Juliana Br Ginting**, NPM 2103100034, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 April 2025

Yang Menyatakan,



**Juliana Br Ginting**

# **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI DESA RAYA**

**JULIANA BR GINTING**  
**2103100034**

## **ABSTRAK**

Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* merupakan salah satu bentuk upaya penurunan kasus *stunting* di Desa Raya. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk menjadi pedoman desa dalam mengatasi masalah *stunting* yang terjadi di desa. Namun dalam pengimplementasian kebijakan ini kenyataannya masih terdapat anak yang mengalami *stunting*. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya komitmen dan koordinasi pemerintah desa, posyandu yang tidak mampu mengambil keputusan sebagai implementor, serta masyarakat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam perumusan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu sudah kebijakan yang telah diputuskan oleh Bupati Karo sudah berjalan dengan cukup baik, namun dalam menjalankan kebijakan ini terdapat hambatan. Dalam kajian Perilaku organisasi dan antar organisasi ditemukan komitmen dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait belum mampu mendukung kebijakan secara maksimal. Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yaitu posyandu belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus *stunting* di Desa Raya. Kemudian perilaku kelompok sasaran meskipun kebijakan ini disambut dengan baik namun kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan *stunting* belum sepenuhnya diatasi di Desa Raya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Peran Desa, *Stunting*

## KATA PENGANTAR



*Assalam 'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanhu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah: **“Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya”** guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih untuk yang paling istimewa kepada ayah sambung Ayahanda Aripin dan Ibunda Asmidar Br Sembiring yang telah memberikan motivasi, nasehat, perhatian dan pengorbanan yang selalu diberikan membuat penulis merasa bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa petunjuk

dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Arifin Saleh,S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan informasi selama masa perkuliahan

9. Seluruh Staf Pegawai Pemerintah Desa Raya, Posyandu Desa Raya dan masyarakat di Desa Raya yang telah membantu saya dalam memberikan informasi pada saat penelitian lapangan
10. Kepada abang dan adik kandung saya yang paling saya cintai yang telah menemani saya dalam keadaan bahagia maupun sedih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada teman seperjuangan penulis, Sindy Adelia, Pertiwi dan Salsabilla yang selalu membantu dan mendukung selama penulis mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya semoga semua pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu mendapatkan balasan dari Allah SWT, serta penulis memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 23 Maret 2025

Penulis

JULIANA BR GINTING

NPM 2103100034

## DAFTAR ISI

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....             | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                   | 4         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                 | 5         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                | 5         |
| 1.4.1 Aspek Teoritis .....                  | 5         |
| 1.4.2 Aspek Praktis .....                   | 5         |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....             | 5         |
| <b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>         | <b>7</b>  |
| 2.1 Kebijakan Publik.....                   | 7         |
| 2.2 Implementasi Kebijakan .....            | 9         |
| 2.3 <i>Stunting</i> .....                   | 16        |
| 2.4 Peran Desa.....                         | 18        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>      | <b>22</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                   | 22        |
| 3.2 Kerangka konsep .....                   | 23        |
| 3.3 Defenisi Konsep .....                   | 24        |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian.....            | 25        |
| 3.5 Informan atau Narasumber.....           | 26        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....            | 26        |
| 3.7 Teknik Analisis Data.....               | 27        |
| 3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....       | 29        |
| 3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian..... | 29        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>    | <b>32</b> |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1 Hasil Penelitian .....                           | 32        |
| 4.1.1 Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi ..... | 32        |
| 4.1.2 Perilaku Birokrat Level Bawah.....             | 37        |
| 4.1.3 Perilaku Kelompok Sasaran .....                | 39        |
| 4.2 Pembahasan.....                                  | 41        |
| 4.2.1 Perilaku Organisasi dan Antar Organisas .....  | 42        |
| 4.2.2 Perilaku Birokrat Level Bawah.....             | 45        |
| 4.2.3 Perilaku Kelompok Sasaran .....                | 47        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                           | <b>49</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                   | 49        |
| 5.2 Saran .....                                      | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>51</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 3.5</b> Nama atau Informasi Narasumber..... | 26 |
|------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 3.2</b> Kerangka Konsep.....           | 23 |
| <b>Gambar 3.9</b> Peta Kecamatan Berastagi ..... | 31 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

*Stunting* (anak pendek ) merupakan salah satu isu besar yang sedang menjadi tantangan dunia khususnya negara berkembang seperti Indonesia. *Stunting* menjadi permasalahan kesehatan karena dapat menyebabkan resiko menghambat perkembangan otak, perkembangan motorik, perkembangan mental, dan juga dapat menyebabkan kematian. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang (Asri, 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan KEMENKES No. 20 Tahun 2020 Pasal 2, parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi: Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB), dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

*Stunting* secara sensitif dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. *Stunting* juga dapat

terjadi ketika ibu hamil kekurangan gizi. Kondisi gizi ibu hamil berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan janin. Ibu hamil yang kekurangan gizi beresiko melahirkan bayi dengan berat dibawah rata-rata dan hal ini merupakan penyebab utama *stunting* (Hidayanti, dalam (Harlina, Hidayanty and Nur, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan tahun 2023 angka *stunting* secara nasional tercatat 21,5 persen mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dari tahun 2022 yaitu 21,6 persen. Selain itu, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) menyatakan bahwa proporsi *stunting* pada balita terdampak status gizi pendek dan sangat pendek di Indonesia sudah mengalami penurunan dari 18,4% pada tahun 2022 menjadi 16% pada tahun 2023 (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi kasus *stunting* pada anak usia dini adalah Kabupaten Karo. Dikutip dari data yang diterbitkan dalam bentuk artikel bahwa pada tahun 2021 *stunting* di Kabupaten Karo adalah 17.18%, kemudian mengalami penurunan sebesar 16,26% dan mengalami penurunan lagi pada tahun yang sama yaitu 8.88%. Namun ini masih menjadi berita yang buruk karena belum mencapai target Indonesia dalam penurunan kasus *stunting*.

Berdasarkan fakta diatas maka Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi masalah *stunting* ini yaitu, Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021. Dimana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di desa.

Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting*.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo yang bertujuan untuk meningkatkan peran desa dalam memenuhi gizi masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengelolaan program gizi yang lebih baik, dan adanya komitmen koordinasi antar sektor dalam upaya perbaikan gizi, serta memperkuat pelaksanaan konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Diharapkan dapat mampu meminimalisir kasus *stunting*.

Namun pada kenyataanya *stunting* di Kabupaten Karo masih terus terjadi. Upaya pencegahan *stunting* terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk terjun ke lapangan secara langsung. Desa merupakan organisasi terkecil dalam pemerintahan yang sah serta memiliki hak dan kewajiban dalam mengatasi masalah *stunting*. Dengan adanya Rembuk *Stunting* di Kabupaten Karo yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya bersama menangani masalah *stunting* untuk meningkatkan kesehatan. Dalam kegiatan Rembuk *stunting* diadakan diskusi dan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung upaya penanggulangan *stunting*. Masalah utama meliputi rendahnya pemahaman gizi, peran krusial perempuan dalam pola makan keluarga, dan kendala akses terhadap pangan berkualitas terutama di Desa.

Meskipun program ini sudah berjalan dan di tandatangani oleh pemerintah desa namun pada kenyataannya dalam pengimplementasian tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Petugas Puskesmas, Bidan Desa, Kader dan Kepala Desa yang mengakibatkan masyarakat belum menerima program yang dilaksanakan sehingga program ini menjadi salah sasaran.

Masalah *stunting* di Desa Raya disebabkan oleh banyak faktor lain; mulai dari keterbatasan masyarakat tentang pengetahuan gizi serta keterbatasan dalam akses kesehatan. Tidak hanya masyarakat, pemerintah desa juga masih kurang optimal dalam menjalankan program ini di desa. Sering kali anggaran yang digunakan untuk program *stunting* tidak tepat sasaran, sehingga masalah *stunting* masih sulit untuk diatasi. Keterbatasan alat ukur serta petugas kesehatan di posyandu desa juga menjadi salah satu penyebab masalah *stunting* sulit untuk diatasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang sejauh mana kasus *stunting* yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat dengan mengangkat judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa Raya”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Bupati Karo

Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa Raya?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengimplementasian Kebijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa Raya

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat digunakan bahan kajian referensi kinerja pemerintah desa dalam menanggulangi masalah *stunting* di Desa Raya, Kabupaten Karo dan dapat mendukung keperluan peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pemerintah desa dalam penanggulangan *stunting* di Desa Raya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, *Stunting*, Pemerintah Desa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan Jenis Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara informasi dan narasumber.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu pendoman untuk tindakan yang berkaitan dengan pengimplementasian filosofi, prinsip, visi, dan keputusan yang dituangkan ke dalam bentuk proyek, program, dan aktivitas (Khan dan Khandaker, 2016).

Menurut pandangan Gerston (2002) dalam (Islamy, 2014) kebijakan publik itu bukan hanya berisi serangkaian keputusan melainkan juga komitmen dan tindakan nyata dari mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Hal ini bisa dimaknai bahwa mereka yang membuat keputusan haruslah mempunyai komitmen yang kuat terhadap keputusan yang telah dibuatnya, bahwa keputusan itu dibuat secara benar, berisi substansi yang sangat bagus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata menuju ke tujuan yang diinginkan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Anggara, 2019 hal, 35) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, maka pusat perhatian kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh

pemerintah, justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu pula. Sehingga untuk efektifitas kebijakan publik diperlukan adanya kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan (Wijaya dkk., 2020).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kebijakan public mengandung pengertian sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Robert T. Nakamura dan F.Swallood (dalam Sulaeman. 1998:5), bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan pencapaian suatu tujuan, maka kebijakan memerlukan adanya strategi dan taktik. Sehubungan dengan hal itu Raksatiya (Sunggono, 1994:21) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu strategi dan taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat suatu tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat, karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan di hasilkan (Mahardika dan Nalar Rizki, 2021).

Implementasi kebijakan adalah mengimplementasikan suatu program yang telah direncanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut (Ayuningtyas,dkk, 2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang mendistribusikan (menyalurkan) keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (*target gorup*) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Sedangkan pandangan dari Van Metter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh swasta dan pemerintah baik secara kelompok maupun secara individu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Purwanto (2012) dalam (Ayuningtyas, Misnaniarti and Rayhani, 2018) ,mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang mendistribusikan (menyalurkan) keluaran kebijakan (*to deliver policy*

*output*) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. sedangkan pandangan dari Franklin dan Repley dalam Budi Winarno (2007) mengatakan bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan kekuasaan (*otoritas*) program, keuntungan (*benefit*), kebijakan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dalam hal tersebut istilah dari implementasi menunjuk bahwa pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang dikehendaki oleh para pejabat pemerintah.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau program dengan melibatkan berbagai sektor termasuk masyarakat, swasta, dan pemerintah itu sendiri. Kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan atau proses dapat membawa program ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, penulis menggunakan teori Soren C. Winter (2003) dalam menganalisis permasalahan implementasi kebijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya. Penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan tersebut karena teori ini sangat relevan dan sesuai dengan topik penelitian yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan publik. Teori ini menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dinamika antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan.

Teori Soren C Winter melihat implementasi kebijakan sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai “model integrated”. Model *integrated* menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Teori implementasi kebijakan Soren C. Winter dalam (Folensino, dkk, 2023) yang disebut Model Implementasi *Integratif (Integrated Implementation Model)*. Ada beberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi proses pengimplementasian sebuah kebijakan yaitu, sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau perantara pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat

implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

Perkembangan hubungan antarorganisasi belakangan kian populer, sehingga para praktisi dan sarjana melahirkan istilah kolaboratif yang menentukan dan mempengaruhi hasil suatu program. Beberapa tahun terakhir muncul istilah yang lebih dikenal jaringan, dan manajemen jaringan. Istilah secara keseluruhan dikenal dalam hubungan koordinasi antar organisasi yang dapat meningkatkan dan menentukan pola implementasi kebijakan. Faktor selanjutnya adalah proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai oleh adanya komitmen dan koordinasi (Winter,2003).

Dalam lingkungan implementasi, komitmen merupakan kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme diantara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Kontribusi suatu organisasi terhadap implementasi sangat tergantung input yang diterima dari hubungan inter organisasi secara timbal balik dan saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan kebijakan dicapai pada titik optimal dalam merealisasikan kebutuhan dan kepentingan. Pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan

berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun, implementasi kebijakan sangat rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih rumit. Itulah sebabnya, kadangkala akibat kerumitan tadi membuat permasalahan kebijakan terbengkalai. Pemerintah belum bisa menerapkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan antara yang satu dengan lainnya.

## 2. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Dimensinya adalah diskresi. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan di luar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya menyimpang dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya (Parawangi,2011).

Kontribusi pemikiran Lipsky sangat penting untuk memahami model implementasi yang satu ini, dan teorinya lebih khusus terhadap mekanisme dalam menjelaskan berbagai kebijakan dan konsekuensinya. Birokrasi level bawah bekerja dalam situasi yang ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat.

Michael Lipsky (1980) menggambarkan birokrasi level bawah ini sebagai “jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat”. Dan secara substansial, mereka memiliki pertimbangan berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan, berdasarkan posisinya ditengah masyarakat itu, mereka memiliki peluang lebih besar dalam putusan kebijakan. Mereka dapat memberi pertimbangan, menggunakan pengaruhnya diluar kewenangan formal, sebagaimana Lipsky menyebut bahwa dalam implementasi kebijakan pengaruh lebih dominan berasal dari pekerja level bawah ini. Pekerja level bawah ini pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus dicapai, dan bagaimana cara melakukannya.

Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga adat, konselor dan semacamnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level bawah. Mereka ini mengabdikan diri sebagai “warga Negara yang membantu menciptakan dan melakukan pelayanan publik berdasarkan norma”.

### 3. Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Variabel perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif (Winter:2003).

Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Tentang siapa kelompok sasaran yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, dan seberapa jauh dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh sekelompok sasaran. Terjadinya “*error*” dan “*distorsi*”

atau proses komunikasi menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan (Parawangi,2011).

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan model implementasi kebijakan Winter di atas, maka kelebihan yang dimiliki adalah kemampuan mengintegrasikan dan menyederhanakan beberapa model implementasi menjadi satu model yang tidak rumit terutama pada jaringan organisasi. Kelemahannya adalah tidak menjelaskan lebih rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

### **2.3 Stunting**

Menurut WHO, *stunting* adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak akibat gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Seorang anak didefinisikan *stunting* jika tinggi anak berdasarkan usia mereka lebih dari dua deviasi di bawah Standar Pertumbuhan Anak WHO (WHO, 2015).

*Stunting* merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang menjadi perhatian dunia. *Stunting* juga merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam Sustainable Development Goal (SDGs) sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan. *Stunting* termasuk kedalam bagian pembangunan berkelanjutan yaitu untuk menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau kelaparan salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan (Jeki dan Reni,2019) dalam (Hendrayanti and Sari, 2023).

## 1. Faktor Penyebab *Stunting*

Penyebab tidak langsung kejadian *Stunting* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi karena hal ini erat kaitannya dengan kemampuan memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita., urbanisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan, Pendidikan serta pemberdayaan perempuan. Penyebab lain dari kondisi anak stunting adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja. Tidak terlaksananya Inisiasi Menyusui Dini (IMD), gagalnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) perlu diperhatikan kuantitas, kualitas, keamanan dan kebersihan pangan yang diberikan. (TNP2K et al., 2018) *Stunting* tidak hanya berdampak pada gagal tumbuh anak, tetapi juga dapat berdampak pada intelektual anak bahkan penyakit kronis lainnya seperti kanker yang dapat mengganggu pendapatan perkapita Indonesia dimasa yang akan datang (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018, p. 04).

## 2. Dampak *Stunting*

Dampak yang ditimbulkan *stunting* dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Dampak tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Dampak jangka pendek

- 1) Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian
  - 2) Tidak optimalnya perkembangan kognitif, motorik dan verbal
  - 3) Peningkatan biaya kesehatan
- b. Dampak jangka panjang
- 1) Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan umurnya)
  - 2) Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya
  - 3) Menurunnya kesehatan reproduksi Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah
  - 4) Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

Masa emas pertumbuhan adalah pada 100 HPK. Apabila masa emas ini tidak terjadi sebagaimana mestinya, maka pertumbuhan tidak bisa dikejar pada periode berikutnya bahkan ketika gizinya dipenuhi dengan baik dan anak tetap akan mengalami gangguan pertumbuhan otak sehingga akan berdampak pada masa depan anak (Fitri, 2018).

## **2.4 Pemerintah Desa**

Desa adalah tingkat pemerintahan terkecil yang ada dalam sebuah negara. Dimana, pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya menjadi perdebatan di tingkat elit politik. Pemerintah desa terdiri dari kata pemerintah dan desa, pemerintah berarti organ yang melaksanakan atau pejabat yang menjalankan kekuasaan negara (Hajar, 2021).

Pemerintahan Desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Solekhan (2012) dalam (Hajar, 2021), berpendapat bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.
- g. Dan lain sebagainya.

Sesuai dengan amanat Bupati Karo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi, maka pemerintah Desa Raya wajib menjalankan peran yang telah diberikan. Adapun peran desa yang dimaksud adalah:

- a. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan desa untuk mendukung perencanaan *stunting*;
- b. Mensosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat;
- c. Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya
- d. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- e. Menyelenggarakan rembuk *stunting* desa
- f. Tersusunnya rencana aksi pencegahan *stunting* di desa
- g. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
- h. Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*;
- i. Meningkatkan atau membangun sarana prasarana intervensi sensitif sesuai kewenangannya
- j. Meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun lembaga non pemerintah lainnya;

- k. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada Perangkat Daerah terkait;
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- m. Melakukan pemuatahkirian data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, untuk menurunkan kasus *stunting* di Indonesia maka harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Desa diberikan hak serta kewenangan untuk menangani kasus *stunting* sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Mouwn Erland, 2020).

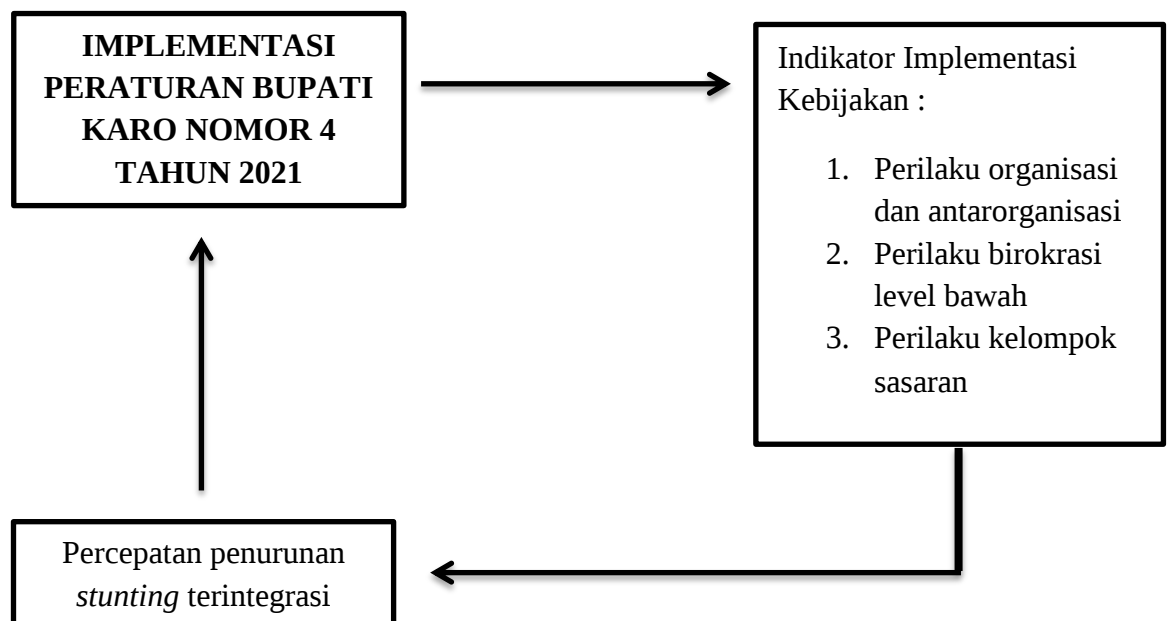
Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Saputra dan Ali, 2020). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi di lapangan mencatat secara detail apa yang terjadi, melakukan analisis reflektor terhadap dokumen yang di temukan di lapangan, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dalam bentuk laporan penelitian.

Menurut Arikunto penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi, hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan (Arikunto,2014).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan metode deskriptif. Melalui metode ini, diharapkan penulis mendapatkan makna serta gambaran tentang peranan Pemerintah Desa Raya dalam menanggulangi masalah *stunting*.

### 3.2 Kerangka Konsep

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dengan menggunakan Teori Soren C. Winter.



*Gambat 3.1Kerangka Konsep*

### 3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjelasan tentang suatu konsep yang bersifat teoritis. Definisi ini mengacu pada pengertian yang berasal dari literatur atau teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono,2015). Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai konsep yang akan diteliti, serta membedakannya dari definisi operasional yang bersifat lebih konkret dan terukur. Untuk dapat menentukan batasan yang lebih jelas agar lebih menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka peneliti menggambarkan konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Soren C.Winter antara lain:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi (*Organizational and interorganizational behavior*) Dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi:
  - a. komitmen yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada.
  - b. Koordinasi yaitu dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun pelaksanaan kegiatan.

2. Perilaku birokrasi level bawah (*Street Level bureaucratic behavior*)

Perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu diskresi. Diskresi adalah kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program

sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal.

3. Perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*)
  - a. Respon positif yang mendukung antusias untuk berpartisipasi terhadap kebijakan yang diselenggarakan.
  - b. Respon negatif yaitu adanya penolakan atau kritik terhadap kebijakan yang diselenggarakan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

1. Adanya komitmen dan koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Adanya hubungan dan kerjasama antar organisasi yang berbeda dalam proses implementasi kebijakan.
3. Adanya respon pejabat birokrasi level bawah yang langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Adanya respon dan reaksi dari kelompok individu yang menjadi sasaran kebijakan.

### 3.5 Informan atau Narasumber

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terhadap yang diteliti. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah jenis sampel nonprobabilitas yang mana tujuan utamanya membentuk sampel secara rasional dan dapat mewakili populasi sampel. Purposive sampling juga dikenal dengan sebutan selective sampling dimana peneliti memilih sendiri informan yang dianggap lebih banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.

**Tabel 3.1 Nama dan Informasi Narasumber**

| No. | Nama                | Inisial | Jabatan                                  |
|-----|---------------------|---------|------------------------------------------|
| 1.  | Aminta Ketaren      | AN      | Kepala Desa Raya, Kabupaten Karo         |
| 2.  | Nanda Ketaren       | NK      | Ketua Tim Percepatan Stunting Desa Raya  |
| 3.  | Rendra Br Sembiring | RS      | Bidan Posyandu Desa Raya, Kabupaten Karo |
| 4.  | Rini                | R       | Ibu dari anak yang <i>stunting</i>       |
| 5.  | Siti                | SM      | Ibu dari anak yang <i>stunting</i>       |
| 6.  | Leni                | L       | Masyarakat                               |
| 7.  | Korenti             | K       | Masyarakat                               |

Sumber Analis Penelitian 2025

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang di teliti. Sesudah itu, peneliti menganalisis dan memahami berbagai gejala yang bersangkutan dengan objek penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Wawancara

Metode wawancara melibatkan interaksi dan komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang relevan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan ke responden dan kemudian responden menjawab secara lisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dengan mengumpulkan data dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa peraturan atau pasal maupun buku referensi yang bersangkutan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang diperlukan terkait implementasi kebijakan penanggulangan *stunting*.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ni menggambarkan atau mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Desa Raya Kabupaten Karo. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu perumusan dan penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data menjadi bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan dan membuang hal-hal yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara yang sebagaimana mestinya, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik data untuk diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data ini terkait dengan mengumpulkan informasi secara tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya dalam penarikan kesimpulan dari peneliti saat mengambil tindakan. Dengan begitu akan membantu sehingga mudah memahami hal-hal yang akan terjadi dan yang harus dilakukan penelitian terkait tindakan dalam menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, Adapun kesimpulan yang akan dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam pengumpulan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun tempat yang akan dijadikan tempat penelitian ini dilakukan adalah di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Waktu yang digunakan pada penelitian ini, dilaksanakan sejak tanggal diizinkan penelitian dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan yaitu bulan Februari-Maret 2025 yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan pada saat proses bimbingan berlangsung.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

Desa Raya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 712 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa (berdasarkan data terbaru). Desa ini merupakan bagian dari kawasan yang kaya akan budaya dan tradisi Karo, dengan mayoritas penduduknya berasal dari suku Karo. Bahasa Karo dialek Gugung adalah bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat setempat.

Sebagian besar penduduk Desa Raya bekerja di sektor pertanian. Mereka mengelola lahan untuk menanam berbagai jenis sayur dan buah-buahan, seperti jeruk, tomat, kentang, dan kol. Hasil pertanian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan

diekspor ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Raya. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di desa ini adalah Taman Seribu Bunga, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arih Ersada. Tempat ini menawarkan pemandangan indah dengan ribuan bunga berwarna-warni, udara sejuk, dan fasilitas seperti area parkir, kios suvenir, tempat makan, serta spot foto yang menarik.

Selain pertanian dan pariwisata, beberapa penduduk Desa Raya juga bekerja sebagai pedagang, pengrajin, dan tenaga kerja di sektor jasa. Kehidupan masyarakat di desa ini sangat erat dengan tradisi dan budaya Karo, yang tercermin dalam berbagai acara adat, seperti pesta pernikahan, upacara kematian, dan perayaan hari besar keagamaan. Mayoritas penduduk Desa Raya memeluk agama Kristen, diikuti oleh Islam, Buddha, Hindu, dan kepercayaan lainnya, yang mencerminkan keberagaman dan toleransi di desa ini.

Desa Raya juga memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik dalam sektor ekonomi maupun pariwisata. Dengan lokasinya yang strategis, hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Berastagi, desa ini mudah diakses oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah desa bersama masyarakat setempat terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 3.2 Peta Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Desa Raya

##### **4.1.1 Perilaku organisasi dan antar organisasi**

Perilaku organisasi dan antar organisasi adalah sikap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Raya Kabupaten Karo. Adapun dimensi perilaku hubungan antarorganisasi adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.

##### **a) Komitmen**

Komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang berkaitan dengan pelaksana kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Raya Kabupaten Karo. Tentunya hal ini tidak mudah untuk menjaga stabilitas jaringan yang dimaksud, karena adanya kepentingan yang berbeda-beda yang diemban oleh masing-masing instansi terlibat. Oleh karena itu komitmen merupakan hal yang sangat penting

untuk mencapai tujuan dari kebijakan penagnggulan *stunting* di Desa Raya Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Raya Kabupaten Karo, Bapak Aminta Ketaren pada 5 Maret 2025 beliau mengatakan implementasi kebijakan *stunting* dari segi terarah (intervensi spesifik) secara langsung memang dilakukan di desa, kami melakukan beberapa program seperti memberikan Program Makanan Tambahan (PMT). Programnya itu kami berkomitmen dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS ) Kepala Kesejahteraan Masyarakat, dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa ,Pemerintah Desa Raya dalam implementasi kebijakan peran desa dalam menanggulangi *stunting* melibatkan beberapa pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS ), Kepala Kesejahteraan Masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat dalam menanggulangi permasalahan *stunting* di Desa Raya. Kemudian dalam wawancara di atas, dapat dilihat juga bahwa intervensi spesifik dilakukan pada tingkat masyarakat sensitif, tekanan pada pendekatan dan kerjasama yang baik. Dimana yang dimaksud komitmen adalah melakukan kerjasama dalam menanggulangi *stunting* di Desa Raya dengan beberapa pihak terkait.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Raya mengatakan beliau mengatakan kami juga berkomitmen kepada masyarakat dengan melakukan

beberapa langkah-langkah dalam menanggulangi *stunting* yaitu dengan memberikan sosialisasi, advokasi dan PMT kepada masyarakat terkait bagaimana menanggulangi *stunting* dan juga setiap masyarakat pendatang yang tinggal di kawasan Desa Raya kami tetap memberikan perhatian, kemudian kedepannya kita akan membentuk desa nol *stunting*, yang artinya diharapkan kedepan tidak ada lagi yang terkena *stunting* di desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Raya menunjukkan komitmen yang kuat kepada masyarakat dengan langkah-langkah yang kognitif dalam menanggulangi masalah *stunting*. Melalui wawancara di atas, Kepala Desa Raya menjelaskan bahwa tindakan yang diambil dalam menanggulangi *stunting* yaitu dengan melakukan sosialisasi, advokasi, serta memberikan PMT. Pemerintah Desa Raya juga memberikan perhatian kepada masyarakat pendatang yang termasuk ke dalam kategori *stunting* sehingga rencana Desa Raya nol *stunting* akan tercapai.

#### b) Koordinasi

Koordinasi adalah upaya menyelaraskan dan mengarahkan berbagai kegiatan antar pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam implementasi kebijakan, koordinasi antar organisasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan, sehingga kerja sama yang terkoordinasi sangat diperlukan. Koordinasi ini mencakup baik pengambilan keputusan, terutama dalam hal penyediaan data dan informasi, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Raya mengatakan bahwa kami telah berkoordinasi dengan yang terkait seperti Dinas Kesehatan, posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dimana koordinasi yang dilakukan sangat terarah semua saling bekerjasama baik, baik itu dalam hal pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Desa Raya telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Posyandu dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dalam upaya menanggulangi masalah *stunting*. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan peran desa yang bertujuan untuk mengurangi angka *stunting* terutama di desa. Melalui kolaborasi yang terstruktur dan terarah, diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pihak instansi terkait sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dapat dilakukan secara komperensif dan efesien. Dengan demikian, angka *stunting* di desa dapat turun secara signifikan.

Lanjut hasil wawancara dengan ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bapak Nanda Ketaren 6 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa: Kami juga melakukan rembuk *stunting* dengan pihak terkait dan juga sosialisasi kepada masyarakat, dalam kegiatan ini kami mendiskusikan bagaimana agar *stunting* di Desa Raya bisa berkurang, karena banyaknya pendatang yang tinggal sementara waktu atau hanya beberapa bulan saja, membuat kami terkadang kesulitan untuk memantau bagaimana perkembangan anak yang terkena *stunting* namun kami tetap menjalankan tugas kami sebagaimana mestinya”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah desa dengan pihak terkait melakukan kegiatan Rembuk *Stunting* guna untuk menyusun strategi dalam menanggulangi kasus *stunting*. Kesulitan yang dihadapi adalah banyak masyarakat pendatang yang tidak menetap dalam jangka waktu yang lam sehingga data *stunting* sulit untuk diperbaharui. Namun hal ini tidak menjadi hambatan yang berarti bagi Pemerintah Desa dan Instansi terkait, mereka tetap menjalankan perannya seperti memberikan arahan serta advokasi kepada masyarakat bagaimana pencegahan *stunting* dapat dilakukan. Langkah-langkah yang strategis dapat menaggulangi *stunting* di Desa Raya. Dalam hal ini pihak instansi yang terkait aktif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan penanggulangan *stunting*. Koordinasi yang terarah dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak yang tercipta, memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif serta pelaksanaan kegiatan yang terarah dengan baik dapat mengatasi masalah *stunting* secara menyeluruh.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa Pemerintah Desa Raya memang terus melakukan upaya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan avdokasi kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan serta pemantauan agar angka *stunting* di Desa Raya dapat bekurang. Tetapi melalui upaya yang telah dilakukan sayangnya pendataan kasus *stunting* di Desa Raya tidak diperbaharui sehingga sulit melihat apakah *stunting* di Desa Raya sudah teratasi atau tidak.

#### 4.1.2 Perilaku birokrat level bawah

Perilaku birokrasi tingkat bawah, khususnya dalam hal diskresi merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* di Desa Raya. Secara umum, diskresi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan penting dalam pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan pengaruh yang melampaui kewenangan formal. Seperti yang dijelaskan oleh Lipsky (1980) dalam Parawangi (2011), implementasi kebijakan kadang kala melibatkan penyimpangan dari tugas resmi untuk lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat saat menyampaikan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi tingkat bawah memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan publik, dengan kinerja yang cenderung sejalan dengan standar kebijakan yang relevan dengan aktivitas mereka.

Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yang dimaksud disini adalah kemampuan posyandu desa dalam menjalankan kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Raya. Kemampuan Posanyu Desa sebagai implementor kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Raya sudah merupakan ketetapan dalam kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidan Posyandu Desa Raya, Ibu Rendra Sembiring pada 5 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa: Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh posyandu merupakan implementasi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Karo dan juga keputusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Karo. Program-program yang dijalankan untuk mengatasi masalah stunting meliputi deteksi dini, pemeriksaan tumbuh kembang anak di Posyandu, pemeriksaan rutin bulanan, termasuk pemberian makanan pendamping ASI, vitamin, penimbangan berat badan, serta pengukuran tinggi badan anak. Selain itu, terdapat kelas ibu balita, penyuluhan kepada ibu balita tentang pentingnya menangani stunting sejak dini, dan kunjungan langsung ke rumah balita yang mengalami stunting.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh Posyandu adalah wujud implementasi kebijakan yang dirancang oleh Bupati Karo. Dalam upaya mengatasi stunting, Posyandu Desa Raya melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari deteksi dini untuk memberikan intervensi cepat, pemeriksaan rutin tumbuh kembang anak di Posyandu, hingga edukasi kepada ibu balita melalui kelas tentang gizi, pola makan sehat, dan perawatan anak. Selain itu, dilakukan kunjungan ke rumah balita penderita stunting guna memberikan dukungan dan pemantauan langsung. Serangkaian program ini mencerminkan komitmen Posyandu desa, Pemerintah Desa, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi. Kerjasama erat antara Posyandu Desa dan Pemerintah Desa menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Raya.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan *stunting* oleh Posyandu Desa Raya melibatkan indikator perilaku birokrasi tingkat bawah dalam dimensi diskresi. Pendekatan ini bertujuan agar

kebijakan penanggulangan *stunting* dapat tetap berlanjut dan mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah kegiatan yang dilakukan Posyandu, seperti sosialisasi tentang *stunting*, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, kelas ibu balita, serta kunjungan langsung ke rumah balita yang terdampak *stunting*. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka *stunting* di Desa Raya tidak sepenuhnya berhasil ditekan, sesuai dengan data yang diperoleh peneliti yang dirilis oleh e-sepesikap *stunting* tercatat bahwa Kabupaten Karo, dari tahun 2014 hingga 2023, persentase *stunting* menunjukkan perubahan signifikan. Pada tahun 2021, angka *stunting* tercatat sebesar 17,18%, menurun menjadi 16,26% pada tahun 2022, dan kembali menurun secara signifikan menjadi 8,88% di tahun yang sama. Namun, terdapat kesenjangan data yang mencolok antara hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data dari ePPGBM.

#### **4.1.3. Perilaku kelompok sasaran**

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Raya adalah perilaku dari kelompok sasaran, yang mencakup respons positif maupun negatif. Perilaku ini menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap para pelaksana kebijakan, yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat yang terdampak kasus *stunting* di Desa Raya memberikan respons terhadap upaya penanggulangan *stunting* yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dari Anak Penderita *Stunting*, Rini pada tanggal 5 Maret mengatakan bahwa “saya sebagai ibu, merasa sangat

terbantu dengan adanya kebijakan ini, sebelumnya saya tidak tahu apa itu *stunting* yang saya tahu hanya tubuh anak saya tidak sama dengan anak seusianya. Bidan sering datang kerumah untuk melihat perkembangan anak saya”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa, orang tua anak penderita *stunting* sangat terbantu dengan adanya kebijakan peran desa dalam penanggulangan *stunting* yang diimplementasikan melalui posyandu desa. Dengan adanya kontrol pertumbuhan dan perkembangan yang teratur, orang tua merasa lebih tenang dan yakin bahwa anaknya mendapatkan perawatan yang tepat. Dapat dilihat bahwa kebijakan ini tidak hanya mampu mengatasi masalah medis saja, kebijakan ini juga mampu memberikan dukungan emosional bagi orang tua.

Lanjut hasil wawancara dengan Ibu dari Anak Penderita *Stunting* Ibu Siti mengatakan pada 6 Maret beliau bahwa: “selain itu saya juga jadi tahu bagaimana cara untuk memenuhi gizi yang baik untuk anak saya, kalau misal saya akan mengandung lagi saya jadi paham untuk menghindari *stunting* saya juga harus menjaga pola makan untuk gizi yang baik sampai pada saat anak umur 2 tahun.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa melalui kebijakan penanggulangan *stunting*, orang tua diberikan kesempatan untuk memahami pentingnya pemenuhan gizi yang tepat, mulai dari masa kehamilan hingga usia anak mencapai dua tahun. Kebijakan ini membantu orang tua memperoleh wawasan tentang cara menyediakan nutrisi optimal untuk kesehatan anak, mengenali makanan yang kaya gizi, serta mengintegrasikannya ke dalam pola makan harian. Dengan edukasi ini, orang tua diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan

perkembangan anak yang mengalami *stunting*, sehingga anak dapat menerima asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembangnya.

Lanjut hasil wawancara dengan Masyarakat Leni pada 7 Maret 2025 yang mengatakan bahwa: “dari yang saya lihat anak yang terdampak *stunting* disini cukup terbantu dari program di posyandu untuk balita penderita *stunting*, saya lihat biasanya posyandu memberikan susu makanan yang gizinya lengkap”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan di posyandu sangat bermanfaat bagi anak-anak yang mengalami *stunting*. Penyuluhan ini memberikan edukasi yang berharga tentang nutrisi yang sesuai dan cara merawat kesehatan balita. Dengan adanya penyuluhan tersebut, orang tua dapat memahami kebutuhan gizi anak-anak mereka serta langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhinya. Kebijakan ini memungkinkan orang tua untuk bertindak dan mendapatkan dukungan dalam memperbaiki status gizi anak mereka. Akibatnya, anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga risiko *stunting* di masa depan dapat berkurang.

## **4.2 Pembahasan**

Dari hasil observasi dan proses pengumpulan data serta wawancara yang dilakukan peneliti dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* terintegrasi oleh Pemerintah Desa Raya tidak mampu menekan angka *stunting* di Desa Raya.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* terintegrasi oleh Pemerintah Desa Raya tidak mampu menekan angka *stunting* di Desa Raya. Dengan pisau analisis berdasarkan kajian teori Soren C.Winter yaitu: perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Pembahasan secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

#### **4.2.1 Perilaku organisasi dan antar organisasi, dimensinya komitmen dan koordinasi**

##### **a) Komitmen**

Komitmen yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan peran desa dalam intervensi *stunting* di Desa Raya. Implementasi kebijakan membutuhkan hubungan antar organisasi untuk menciptakan kebijakan umum ke dalam atauran yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan.(winter 2003).

Komitmen dalam upaya mengatasi *stunting* melibatkan peran Peran Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten, yang menunjukkan dedikasi pemerintah dalam kegiatan Rembuk *Stunting* untuk menangani persoalan *stunting* demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Rembuk *Stunting* juga berfungsi sebagai wadah untuk memperoleh dukungan komitmen dari forkopimda dan kepala OPD dalam menurunkan angka *stunting*. Selain itu, kegiatan ini mencakup

diskusi dan penandatanganan komitmen bersama guna mendukung langkah-langkah penanggulangan *stunting*. Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan berbagai pihak menegaskan pentingnya aktivitas yang lebih terarah dalam mengatasi *stunting* di Desa Raya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 pasal 5 tentang peran desa dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa. Artinya desa memiliki hak dan kewenangan dalam memutuskan prioritas serta alokasi dana demi menekan angka *stunting* di desa. Penguatan kelembagaan dan kerja sama antar instansi terkait harus dilaksanakan sesuai prosedur agar tujuan yang telah direncanakan dapat terwujud dan tepat sasaran.

Meskipun koordinasi telah dilakukan antara pihak-pihak terkait, upaya tersebut belum mampu memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah *stunting* di Desa Raya. Kolaborasi yang ada masih kurang optimal, sehingga berbagai langkah yang direncanakan belum menghasilkan dampak yang signifikan. Pemerintah Desa Raya juga menghadapi kendala dalam mengambil keputusan yang tepat terkait penanganan *stunting*. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya data yang akurat, atau rendahnya komunikasi dan sinergi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan kolaborasi agar program penanggulangan *stunting* dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan keberhasilan upaya penurunan angka *stunting* di Desa Raya.

## b) Koordinasi

Koordinasi dilakukan dalam aspek pengambilan keputusan, termasuk penyediaan data dan informasi, serta pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks koordinasi, hubungan antara organisasi menjadi sangat penting dan memiliki dampak signifikan terhadap penentuan strategi implementasi. Pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat melibatkan dua atau lebih organisasi untuk mencapainya. (Winter, 2003).

Hasil temuan data yang ditemukan di lapangan Pemerintah Desa Raya dan Posyandu Desa selalu melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, BKKBN, Dinas Kesehatan serta Dharma Wanita dalam upaya menanggulangi *stunting*. Adapun Koordinasi yang dilakukan merupakan Kegiatan Rembuk *Stunting* yang dihadiri oleh pihak instansi terkait dan masyarakat. Namun kegiatan yang dilakukan masih belum bisa mengatasi masalah *stunting* di Desa Raya.

Namun data yang ditemukan dari hasil wawancara dengan masyarakat kegiatan Rembuk *Stunting* tidak begitu intens dilaksanakan. Pemerintah Desa hanya melakukan penyuluhan tentang *stunting*. Dan kegiatan penyuluhan ini juga tidak terlalu mendapatkan antusias dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor keadaan sosial dan ekonomi serta keterbatasan sumber daya manusianya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu koordinasi perlu dibangun untuk dapat menyatukan sasaran dan kegiatan dari unit organisasi yang terlibat

secara peraturan. Percepatan perbaikan gizi secara nasional merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penanggulangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi.

Proses implementasi dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satu di antaranya adalah dengan memenuhi implementasi kebijakan di dalam suatu organisasi. Namun, untuk mencapai kinerja implementasi yang lebih efisien dan efektif, dibutuhkan komitmen serta koordinasi yang baik antara berbagai

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peran Desa dalam Intervensi *stunting* dalam indikator perilaku organisasi dan antar organisasi yang dimensinya komitmen dan koordinasi belum terlaksana dengan baik sehingga, angka *stunting* di Desa Raya belum bisa diatasi.

#### **4.2.2 Perilaku birokrasi level Bawah**

Perilaku birokrasi pada tingkat level bawah mencakup sikap dan tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditas di kawasan strategi kabupaten. Salah satu karakteristik utama dari perilaku birokrasi level bawah adalah adanya diskresi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai jabatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, birokrasi level bawah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Selain itu, kinerja birokrasi pada level ini menunjukkan konsistensi tinggi terhadap standar program yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. (Parawangi, 2011)

Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* di Desa Raya melalui indikator perilaku birokrasi

level bawah dalam dimensi diskresi yang di tunjukkan kepada Posyandu Desa Raya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Posyandu Desa Raya merupakan hasil kebijakan dari Bupati Karo kemudian diskresi dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat yang memiliki balita yang berumur kurang lebih 2 tahun dan khususnya bagi masyarakat yang terdampak *stunting*. Kemudian diskresi ini juga dilakukan atas dasar untuk menyelesaikan masalah penting (emergency) yang timbul.

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Perilaku birokrasi level bawah yang dimaksud adalah posyandu hanya dapat melakukan program yang sudah ada. Posyandu tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan. Sehingga implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* yang diskresinya adalah posyandu, tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga menjadi penyebab masalah *stunting* di Desa Raya belum bisa diatasi.

Kemudian data observasi yang ditemukan di lapangan terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pendataan *stunting* di Kabupaten Karo yang termasuk Desa Raya. Pada tahun 2021, angka *stunting* tercatat sebesar 17,18%, menurun menjadi

16,26% pada tahun 2022, dan kembali menurun secara signifikan menjadi 8,88% di tahun yang sama. Namun, terdapat kesenjangan data yang mencolok antara hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data dari ePPGBM.

Hal ini dapat dilihat juga pada penelitian sebelumnya yaitu Alat ukur yang belum sesuai dengan standard dapat menjadi faktor penghambat dalam kesehatan. Ketidakkuratan alat ukur dapat menyebabkan data yang tidak valid, kesalahan dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap prevalensi *stunting*. (Cecilia dkk, 2024) Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* dalam dimensi diskresi belum berjalan dengan baik.

#### **4.2.3 Perilaku kelompok sasaran**

Perilaku kelompok sasaran mencakup dimensi respons positif dan negatif, yang terwujud dalam sikap serta tindakan yang ditunjukkan selama implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Raya. Respons tersebut diarahkan kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang terdampak oleh kasus *stunting*. Dalam implementasi kebijakan publik, kelompok sasaran dapat berupa individu, organisasi, atau kelompok penerima manfaat yang tidak hanya dipengaruhi oleh hasil kebijakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja pelaksanaan program melalui respons yang bersifat positif maupun negatif (Winter, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Raya

mendapat respons positif dari kelompok sasaran. Posyandu Desa Raya memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kebijakan ini dengan rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang mengalami stunting, guna menjaga kondisi kesehatan ibu dan anak tetap stabil. Selain pemantauan, Posyandu Desa Raya juga aktif mengadakan kegiatan penyuluhan, termasuk penimbangan berat badan serta pengukuran anak-anak yang terdampak kasus stunting. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka stunting yang masih terjadi di Desa Raya.

Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak stunting menunjukkan respons positif terhadap berbagai upaya yang dilakukan. Masyarakat juga terlihat antusias dalam berpartisipasi, terutama dalam pemeriksaan kesehatan dan kegiatan penyuluhan yang diadakan di Posyandu. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Posyandu, yang bertujuan untuk memantau dan mengontrol perkembangan kasus *stunting* di Desa Raya secara keseluruhan.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Posyandu, angka *stunting* di masyarakat belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, terdapat 20 balita yang masih terdampak *stunting* Posyandu Desa Raya pada tahun 2023. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terdapat antusiasme dari masyarakat dan kegiatan rutin yang dilaksanakan, masih diperlukan strategi tambahan atau peningkatan efektivitas program agar target pengurangan angka *stunting* dapat tercapai dengan lebih optimal di masa mendatang. Hal ini juga menegaskan pentingnya evaluasi

program secara menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan dan menemukan solusi yang tepat.

Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering berpindah-pindah tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Karena kondisi wilayah di Kabupaten Karo yang sangat luas menyebabkan banyak masyarakat yang datang dan pergi dalam waktu yang cepat. Sehingga program yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini juga didukung pada penelitian sebelumnya yaitu, partisipasi masyarakat masih kurang aktif atau pasif dalam mengikuti program karena orang tua yang sibuk bekerja atau berpindah-pindah tempat tinggal sehingga ini menjadi kendala dalam percepatan penurunan *stunting*.(Cecilia,dkk, 2024).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* di Desa Raya maka penelitian ini implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan pihak instansi terkait masih belum terjalin dengan baik. Kemudian perilaku birokrasi level bawah juga belum mampu menjalankan diskresi sebagai peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Dan perilaku kelompok sasaran yang tidak begitu antusias dan kooperatif terhadap kebijakan ini. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi yang dimensinya adalah komitmen dan koordinasi. Komitmen yang dimaksud adalah peran desa dalam intervensi penurunan *stunting*. Dan koordinasi adalah kegiatan Rembuk *Stunting* yang dilakukan dengan Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Tim Percepatan *Stunting* dan Posyandu Desa. Namun komitmen dan koordinasi yang dilakukan masih belum dapat menanggulangi *stunting* di Desa Raya
2. Perilaku birokrasi level bawah yaitu peran posyandu yang sangat penting dalam implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting* dimensinya adalah diskresi yaitu Posyandu Desa yang belum mampu untuk

3. membuat keputusan sehingga kebijakan ini belum terlaksana dengan optimal yang mengakibatkan *stunting* di Desa Raya belum dapat diatasi.
4. Perilaku kelompok sasaran yaitu respon positif dan negatif dari masyarakat tentang kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan *stunting*. Masyarakat merespon kebijakan ini dengan positif namun keterbatasan sosial dan ekonomi serta sumber daya manusia menyebabkan *stunting* tidak dapat sepenuhnya diatasi.

## 5.2 Saran

Dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan *Stunting* di Desa Raya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Raya harus meningkatkan komitmen dan koordinasi antara TPPS, Dinas Kesehatan, Posyandu Desa dan pihak instansi terkait serta melibatkan masyarakat untuk mengatasi masalah *stunting*.
2. Melakukan pelatihan khusus peningkatan kualitas SDM kepada kader posyandu dalam mengambil keputusan terutama mengenai intervensi penurunan *stunting*. Menyediakan alat ukur *stunting* yang memenuhi standar serta membuat rekam medis yang lebih baik agar catatan kesehatan anak tetap tersedia meskipun mereka berpindah tempat tinggal.
3. Tetap menjaga respon masyarakat yang positif serta memberikan dukungan baik secara medis dan emosional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hajar, S. (2021) *Pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik*. Available at: <http://umsupress.umsu.ac.id>.

Kementerian PPN/ Bappenas (2018) ‘Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota’, *Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting*, (November), pp. 1–51. Available at: <https://www.bappenas.go.id>.

Kementrian Kesehatan RI (2021) ‘Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021’.

Mouwn Erland (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin.

Mouwn Erland (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin.

### Jurnal

Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M. and Rayhani, M. (2018) ‘Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya’, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.

Cecilia Agitha Hutasoit, Ari Subowo, R.S.S. (2024) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM TATA LAKSANA BALITA DENGAN MASALAH GIZI DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO’, *Journal Public Policy and Management Review*, 13(3), pp. 871–889.

Fitri, L. (2018) ‘Hubungan Bblr Dan Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru’, *Jurnal Endurance*, 3(1), p. 131.

Available at: <https://doi.org/10.22216/jen.v3i1.1767>.

Folensino, S., Asmiddin, A. and Islamy, S. (2023) 'Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton', *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), pp. 73–83.

Available at: <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/article/view/1500>.

Harlina, H., Hidayanty, H. and Nur, M.I. (2021) 'Studi Fakor Resiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Dataran Tinggi Dan Dataran Rendah', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), pp. 501–510. Available at: <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.634>.

Hendrayanti, S. and Sari, C.T. (2023) 'Potential Of Land and Building Transfer Tax ( BPHTB)', *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(4), pp. 1365–1375.

Islamy, I. (2014) 'Definisi dan Makna Kebijakan Publik', *ADPU4410/Modul 1*, pp. 1–41.

Khan, A.R. and Khandaker, S. (2016) 'A critical insight into policy implementation and implementation performance', *Public Policy and Administration*, 15(4), pp. 538–548. Available at: <https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-4-02>.

Mahardika, A. and Nalar Rizki, R. (2021) 'Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), pp. 1647–1654. Available at: <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>.

Saputra, A. and Ali, K. (2020) 'Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir', *Warta Dharmawangsa*, 14(4), pp. 564–584. Available at: <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>.

Wijaya, R. *et al.* (2020) ‘Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Rumah Potong Hewan (Rph) Manggala Di Kota Makassar’, *Journal.Unismuh.Ac.Id*, 1(1), pp. 9–17. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7394>.

### **Dokumen resmi**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting  
 Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam  
 Intervensi Percepatan Penurunan Stunting

### **Website**

<https://beritanasional.id/percepatan-penurunan-stunting-pemkab-karo-lakukan-penilaian-kinerja-stunting-kabupaten-karo-tahun-2024/>

<https://sipesikapstunting.karokab.go.id/articles/14>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DOKUMENTASI



1. Foto dengan Sekdes Desa Raya



2. Foto dengan bidan posyandu Desa Raya



3. Foto dengan Ibu dari anak yang terkena *stunting*



4. Foto ruangan posyandu Desa Raya

## DRAFT WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA RAYA

Nama : Juliana Br Ginting

NPM : 2103100034

Alc  
Draft wawancara  
07 Februari 2025



KAFERAH NALAR PIRBYMA

#### 1. Identitas Narasumber

- Nama:
- Jenis kelamin
- Umur
- Pekerjaa
- Alamat

#### 2. Kategorisasi penelitian

Subjek penelitian: Kepala Desa  
Raya

Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

##### a. Komitmen

1. Bagaimana komitmen yang bapak lakukan untuk menjalankan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya?
2. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi peraturan ini?
3. Bagaimana hubungan timbal balik antar Lembaga pelaksana? Apakah saling membantu satu sama lain?
4. Apakah ada hambatan atau kendala dalam menjalankan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya?

##### b. Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi yang di lakukan pemerintah desa dengan posyandu untuk menjalankan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya
2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam melakukan koordinasi antara pemerintah desa dengan posyandu dalam menjalankan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa?
3. Apakah peraturan yang di keluarkan oleh Bupati sudah cukup untuk menjadi pedoman desa dalam menekan angka stunting di Desa Raya?
4. Diantara berbagai Lembaga/kelompok/perangkat desa yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan ini, apakah ada Lembaga/perangkat desa yang terlihat superior?
5. Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan evaluasi terhadap peran desa dalam program penurunan stunting?

6. Apakah ada keterbatasan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dan kapasitas) yang dapat mempengaruhi kinerja aparat desa maupun posyandu dalam menekan penurunan stunting?
7. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai stunting? Bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan ini?

#### **Perilaku Birokrasi Level Bawah**

Subjek penelitian: bidan posyandu Desa Raya, tokoh Masyarakat, Lembaga adat

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh posyandu untuk menekan penurunan stunting di Desa Raya?
2. Apakah posyandu memiliki kategori khusus dalam menilai anak yang sehat dan normal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar mau datang ke posyandu?
4. Apakah ada laporan rutin yang dibuat terkait pelaksanaan peraturan ini?
5. Bagaimana keterbatasan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dan kapasitas) yang dapat mempengaruhi kinerja aparat desa maupun posyandu dalam menekan penurunan stunting?
6. Bagaimana interaksi antara aparat desa, kader posyandu, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam implementasi intervensi stunting?
7. Apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati sudah cukup untuk menjadi pedoman desa dalam menekan angka stunting di Desa?
8. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan peraturan ini?
9. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai stunting? Bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan ini?
10. Apakah ada saran atau masukan dari Bapak/Ibu dalam menekan angka stunting di Desa Raya?

#### **Perilaku kelompok sasaran**

Subjek penelitian: orang tua dari anak yang terkena stunting

1. Menurut Bapak/Ibu apakah itu stunting?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi?
3. Apakah Bapak/Ibu sering membawa anak Bapak/Ibu ke posyandu? Pemeriksaan bagaimana yang ibu lihat di posyandu?
4. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan kader posyandu terhadap anak Bapak/Ibu? Apa yang mereka katakan dari hasil tersebut?
5. Apakah anak Bapak/Ibu setelah melakukan pemeriksaan di posyandu pernah dimasukkan ke dalam kategori stunting? Jika pernah apa tindakan ibu setelah mengetahuinya apakah langsung menyerahkan ke kader posyandu atau ada tindakan lain dalam menyembuhkannya?

6. Apa saja hal-hal yang dilakukan kader posyandu dalam menindak lanjuti anak yang masuk ke dalam kategori stunting yang ibu ketahui?
7. Apakah saja bantuan yang Bapak/Ibu terima dari posyandu dalam penanganan penurunan anak stunting?
8. Sarana dan prasarana di posyandu ini bagaimana yang ibu lihat apakah sudah mencukupi dan lengkap dalam pemeriksaan anak?
9. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai stunting? Bagaimana respon Bapak/Ibu mengenai kebijakan ini?
10. Apakah ada inovasi atau saran dari Bapak/Ibu dalam penurunan angka stunting di desa raya?



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita mau lebih awal dan agar pelaksanaan lebih baik lagi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN ISLAM MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPI/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003

✉ [help@umsu.ac.id](mailto:help@umsu.ac.id) ✉ [help@umsu.ac.id](mailto:help@umsu.ac.id) 🌐 [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) 📠 [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📠 [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📠 [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📠 [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id)

SK-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, Senin, 04 Nov 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Juliana Br Ginting  
 N P M : 2103100034  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 SKS diperoleh : 126,0 SKS, IP Kumulatif 3,19

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diusulkan                                                                                                                    | Persetujuan   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tahun 2021 tentang peran Desa dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi di Desa Raya | Acc 1/11/2024 |
| 2  | Implementasi peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di dinas kabupaten karu                       |               |
| 3  | Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 32 tahun 2019 tentang Desa wisata di Desa Raya                                                 |               |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 04, November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika M. S.Sos. M.SP)  
 NIDN: 0122118801

Pemohon,

(Juliana Br Ginting)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Rafiqah Nalar Rizky S.Sos. M.A)  
 NIDN: 0104098703

(015) pb: Rafiqah Nalar Rizky S.Sos M.A





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**Nomor : 2068/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **04 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **JULIANA BR GINTING**  
N P M : **2103100034**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**  
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025**  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA  
DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
TERINTEGRASI DI DESA RAYAN**

Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 015.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 04 Mei 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 13 Djumadil Awwal 1446 H  
15 November 2024 M

Dekan,  
  
  
**Dr. ARIFLY SALEH., S.Sos., MSP.**  
**NIDN. 0030017402**



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Eadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) 📠 umsumedan 📠 umsumedan 📠 umsumedan 📠 umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 10 Januari 2024

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Juliana Br Ginting  
N P M : 2103100034  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2068 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 09 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG  
PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI  
DESA PAYA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

(Ananda Maharadika S.Sos., M.SP.)

NIDN: 0122110801

Menyetujui

Pembimbing

(Rafieqah Almar Rizky S.Sr.M)

NIDN: 0104090403

Pemohon,

(Juliana Br Ginting)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 150/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



| No. | NAMA MAHASISWA           | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP                                   | PEMBIMBING                         | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | JULIANA BR GINTING       | 2103100034            | Dr. JEHAN RIDHO<br>IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA RAYAN                |
| 17  | BOBY MARTIN NUSANTARA    | 2103100077            | ANANDA MAHARDIKA,<br>S.Sos., M.SP.          | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.           | STRATEGI PLANNING DALAM PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBINAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI             |
| 18  | HANIFA PERMATA SARI      | 2103100076            | Dr. JEHAN RIDHO<br>IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.    | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PROGRAM PENINGKATAN PAD SEKTOR PAJAK DI KANTOR DINAS BAPENDA SERDANG BEDAGAI |
| 19  | ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG | 2103100047            | AGUNG SAPUTRA, S.Sos.,<br>M.AP.             | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.    | EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI             |
| 20  | FARIZ FATURRAHMAN        | 2103100018            | ANANDA MAHARDIKA,<br>S.Sos., M.SP.          | Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.    | STRATEGI CONTROLLING KELOMPOK PKK DALAM MENJALANKAN PROGRAM DASHAT (DAPUR SEHAT ATASI STUNTING) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI                            |

Medan, 15 Rajab 1446 H  
15 Januari 2025 M  
Medan,  
(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)  
BRR-PT MOA STARS



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhta: Barri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap

: Juliana Br Ginting

NPM

: 2103100034

Program Studi

: Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa  
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

: Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34  
Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan  
Stunting di Desa Kayu

| No. | Tanggal    | Kegiatan Advis/Bimbingan                                               | Paraf Pembimbing   |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | 15/11/2024 | Bimbingan Bab I mengelatar belakang Rumusan masalah, tujuan penelitian | <i>[Signature]</i> |
| 2.  | 18/11/2024 | Bimbingan Bab II memperelas teori yang digunakan                       | <i>[Signature]</i> |
| 3.  | 29/11/2024 | lanjutan bimbingan latar Belakang Bimbingan bab III                    | <i>[Signature]</i> |
| 4.  | 10/1/2025  | Bimbingan bab III sekaligus Acc proposal                               | <i>[Signature]</i> |
| 5.  | 19/2/2025  | Bimbingan draft wawancara + Acc draft wawancara                        | <i>[Signature]</i> |
| 6.  | 21/3/2025  | Bimbingan Bab IV dan Bab V                                             | <i>[Signature]</i> |
| 7.  | 22/3/2025  | Bimbingan Abstrak dan Bab V Acc skripsi                                | <i>[Signature]</i> |
| 8.  | 22/3/2025  | Bimbingan lanjutan Abstrak                                             | <i>[Signature]</i> |
| 9.  | 22/3/2025  | Bimbingan lanjutan Bab IV                                              | <i>[Signature]</i> |
| 10. | 22/3/2025  | Acc skripsi                                                            | <i>[Signature]</i> |

Medan, 21 Maret 2025



(Asses. Prodi) Dr. Anjani Siregar, S.Pd, M.Pd  
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

(Ananda M. Siregar, S.Pd, M. Ed)  
NIDN : 0122110001

Pembimbing,

(Rafiqah Nalar Rizky, S.Pd, M. Ed)  
NIDN : 0104000703





# JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

**Dear Ms. Juliana Br Ginting**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “*Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya*” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, April 14, 2025**

Editor In Chief

**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)**  
**NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. DATA PRIBADI**

Nama : Juliana Br Ginting  
NPM : 2103100034  
Tempat dan Tanggal Lahir : Raya, 27 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara  
Alamat : Desa Raya Berastagi Kab. Karo  
No. Telephone : 081361980036  
Email : julianagins123@gmail.com

### **2. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Ramenta Ginting  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Asnidar Br Sembiring  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Raya Berastagi Kab. Karo  
No. Telephone : 082160882124  
Email : -

### **3. DATA PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar : MIS Addakwah Kabanjahe  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : MTSn Kabanjahe  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Bersama Berastagi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara